

KERAJAAN SUNDA BIHARI DAN KIWARI BERBASIS NASKAH SUNDA KUNO

Elis Suryani Nani Sumarlina dan Undang Ahmad Darsa

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran

E-mail: elis.suryani@unpad.ac.id ; undang.a.darsa@unpad.ac.id

ABSTRAK. Beberapa waktu lalu bermunculan kembali ‘kerajaan baru’, yang tentu saja masalah ini sudah *ngageumbreungkeun* ‘menghebohkan’ media sosial dan masyarakat, sekaligus menggelitik hati. Meskipun strategi, taktik, pola, arah, dan teknik yang mereka gunakan sudah terbaca, namun jika hal itu dibiarkan, akan semakin merajalela, karena semua hal yang kelompok mereka sampaikan tidak sesuai dengan data dan faktanya. Andai ingatan kita mundur ke beberapa waktu yang lalu, tatkala kerajaan Tarumanagara dianggap fiktif, tak ayal masyarakat Sunda terperangah dan terkejut. Ada apa? Masyarakat Sunda yang *tatatengtreng* ‘damai’ seakan terusik, demikian juga waktu hal itu terjadi. Mungkinkah fenomena ‘kerajaan abal-abal’ yang kini muncul saling berkaitan dengan adanya ‘pengingkaran terhadap kerajaan Tarumanagara dimaksud? Jawabannya mungkin ya mungkin juga tidak. Untuk mengungkap masalah ini, akan digunakan metode penelitian deskriptif dan metode kajian filologis, historiografi tradisional, sosial, komunikasi politik, dan kajian budaya secara multidisiplin, agar diperoleh gambaran, data serta fakta berdasarkan naskah Sunda kuno yang mengungkap permasalahan yang ada kaitannya dengan kerajaan Sunda masa lampau beserta aspek-aspek yang mendukung ke arah masalah kepemimpinan, sistem pemerintahan, dan pembagian kekuasaan, yang terungkap dalam naskah dan prasasti.

Kata kunci: Kerajaan Sunda bihari dan kiwari, Naskah Sunda Kuno.

THE ANCIENT AND MODERN SUNDANESE KINGDOM BASED ON OLD SUNDANESE MANUSCRIPT

ABSTRACT. *Some time ago a ‘new kingdom’ appeared again, which of course this problem has caused a stir on social media and society, as well as tickling the heart. Even though the strategies, tactics, patterns, directions, and techniques they use have been read, but if they are left unchecked, it will run rampant because everything their group conveys does not match the data and facts. If our memories go back to some time ago, when the Tarumanagara kingdom was considered fictitious, the Sundanese people would be shocked and surprised. What is it? The peaceful Sundanese people seemed disturbed, as well as when it happened. Could it be that the phenomenon of the ‘fake kingdom’ that is now emerging is related to the ‘denial’ of the Tarumanagara kingdom in question? The answer, is maybe yes, maybe no. To uncover this problem, descriptive research methods and methods of philological studies, traditional historiography, social, political communication, and cultural studies in a multidisciplinary manner will be used, in order to obtain descriptions, data, and facts based on ancient Sundanese manuscripts that reveal problems related to the Sunda kingdom of the past along with aspects that support the problem of leadership, government system, and power sharing, which are revealed in manuscripts and inscriptions.*

Keywords: *The ancient and modern Sundanese Kingdom; old Sundanese manuscript*

PENDAHULUAN

Kita harus menyadari bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang menghargai budayanya. Namun, tinggi rendahnya suatu peradaban yang dimiliki bangsa atau suku bangsa dapat dilihat dari tinggalan budayanya, karena setiap suku bangsa memiliki kearifan lokal yang tersirat lewat tinggalan kearifan budaya para pendahulunya. Demikian halnya dengan *karuhun* ‘nenek moyang’ orang Sunda, yang menyimpan beragam pemikiran, gagasan, ide, cemerlangnya. Salah satu tinggalan budaya masa silam tersebut berkaitan dengan masalah kerajaan, sitem pemerintahan, kekuasaan, dan karakter pemimpinnya, yang terungkap dalam naskah Sunda kuno.

Naskah Sunda kuno abad XVI Masehi yang dijadikan objek kajian tulisan ini, kini tersimpan dalam koleksi skriptorium Kabuyutan Ciburuy Bayongbong

Kabupaten Garut dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Di samping ada juga yang tersimpan di museum, dan perpustakaan yang menyimpan naskah, serta berbagai katalog naskah hasil penelitian para filolog terdahulu, khususnya yang menggeluti naskah Sunda kuno, berbahan lontar/gebang/nipah, beraksara dan berbahasa Sunda (kuno).

Fenomena kerajaan baru, sebenarnya sudah ada sejak lama. Di masyarakat tidak sedikit yang mengaku ‘raja atau ratu’, tapi mereka tidak memiliki keraton dan tidak didukung data fakta, serta bukti nyata terkait kedudukannya sebagai raja dan ratu. Salah satu di antaranya tentang silsilah keturunan.

Masalah kerajaan masa lampau yang terungkap dalam naskah Sunda Kuno, yang Apabila dicermati secara saksama, tanpa kita sadari banyak manfaat serta informasi budaya hasil kreativitas dan *warisan karuhun orang Sunda* berupa naskah abad XVI Masehi, yang bisa kita gali dan kita ungkapkan di

masa kini. Ada beberapa hal menarik dari teks naskah lontar abad ke-16 Masehi tersebut, baik ajaran moral, sistem pemerintahan, kepemimpinan, tanaman obat keluarga, hukum adat, sosial, komunikasi politik, kuliner, konsep tata ruang kosmologis, sejarah, maupun unsur budaya lainnya, yang ditengarai dapat memberi sedikit gambaran mengenai kearifan lokal yang terpendam di dalamnya, yang sangat berharga dan masih relevan untuk diketahui di era global dan canggih saat ini.

METODE

Metode penelitian pada umumnya sama, yakni melalui penelitian deskriptif analisis atau komparatif jika datanya dibandingkan. Yang membedakan antara bidang yang satu dengan bidang lainnya adalah metode kajiannya. Pada dasarnya penelitian filologi itu terbagi atas kajian kodikologi dan kajian tekstologi. Sehubungan dengan itu, metode penelitian yang digunakan untuk mendeskripsi, mencatat, menuturkan, menafsirkan, menganalisis, serta membandingkan, serta mengkajinya digunakan metode deskriptif analisis, melalui suatu proses pemahaman yang bergantung kepada keadaan data dan nilai bahan atau objek penelitian yang dikaji. Untuk itu ditempuh langkah-langkah pengumpulan data berupa naskah yang memuat objek data naskah yang dikaji, yang dilaksanakan berdasarkan informasi hasil studi pustaka, antara lain melalui katalog-katalog naskah.

Metode kajian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kajian kritik teks secara filologis (kodikologis dan tekstologis), dan kajian sosial dan budaya, yang berkaitan dengan unsur-unsur naskah yang di dalamnya mengungkap isi naskah yang diteliti, meliputi ide, gagasan, etika, sistem pemerintahan, kepemimpinan, pembagian kekuasaan, dan komunikasi politik para pemangku kebijakan di masyarakat pada saat naskah itu ditulis atau disalin. Pengumpulan sumber data, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder, dalam penelitian ini ditempuh dengan cara studi pustaka dan kerja lapangan. Studi Pustaka (*library research*) dan Studi Lapangan (*field research*).

Metode deskriptif analisis komparatif yang digunakan dalam penelitian diarahkan guna mengolah teks-teks tertulis dalam naskah tradisai Sunda kuno melalui langkah berikut: pengidentifikasian konteks terhadap teks-teks naskah itu yang memiliki makna fungsional yang sama; pengidentifikasian konteks melalui pengenalan kembali terhadap adanya persamaan-persamaan (*sintagma*) dan perbedaan-perbedaan (*paradigma*); dan mencari relevansi berdasarkan teori-teori yang umum maupun yang spesifik terhadap data yang dihadapi. Hal ini berkaitan dengan

satu dari enam definisi yang dinyatakan Palmer (1969) bahwa hermeneutika merupakan *general philological methodology* ‘metodologi filologi umum’, meskipun tidak secara khusus dibandingkan antara masa lampau dan masa kini.

Berhubung objek dalam tulisan ini berupa hasil edisi teks dari beberapa naskah yang sudah disunting, maka selain metode landasan, digunakan pula metode kajian dan pendekatan budaya secara umum, yang ada kaitannya dengan masalah historiografi, keagamaan, sosial, politik, antropologi, arkeologi, dan kajian budaya. Masalah Kerajaan Bihari terkuak lewat naskah-naskah Sunda *buhun* ‘kuno’ abad 16 Masehi, seperti: Naskah Sanghyang Siksakandang Karesian (SKK), Naskah Carita Parahiyangan (CP), Naskah Fragmen Carita Parahiyangan (FCP), Naskah Amanat Galunggung (AG), dan Naskah Sanghyang Raga Dewata (SRG), Sanghyang Hayu, serta prasasti yang ada di daerah Sunda (bandingkan Darsa, dkk., 2020), sementara fenomena munculnya ‘kerajaan baru’ di era globalisasi saat ini, cenderung menggunakan metode penelitian deskriptif komparatif, melalui kajian budaya secara multidisiplin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerajaan dan Naskah Sunda Kuno

Data, fakta, serta bukti-bukti adanya kerajaan di *masa bihari* ‘masa lalu’, seperti Kerajaan Tarumanagara, terungkap dalam Naskah Sunda Kuno abad XVI Masehi, baik dalam naskah *Carita Parahiyangan (CP)* kropak 406, *Fragmen Carita Parahiyangan*, yang juga ada benang merah dengan *Sanghyang Siksakandang Karesian, Amanat Galunggung/Darmasiksa, Carita Ratu Pakuan, Kisah Perjalanan Bujangga Manik (BM)*, di samping sumber historiografi tradisional *Nagarakretabhumi 1.5*, sumber historiografi tradisional Cirebon *Carita Parahiyangan Sakéng Bhumi Jawa Kulwan Sargah I*, dan *Tantu Panggelaran*. Dokumen budaya berujud naskah tersebut, dapat menjadi pembuka jalan untuk menelusuri eksistensi Kerajaan Tarumanagara di Sunda waktu itu. Bagaimana dengan genealogi, bukti tertulis (naskah dan prasasti) maupun bukti dan fakta sejarah ‘kerajaan’ Sunda *kiwari* ‘masa kini’ yang heboh saat ini? Apakah mereka memilikinya?

Bukti genealogi kerajaan Taruma (Tarumanagara) *bihari* ‘masa lalu’, terungkap juga dalam *Naskah Carita Parahiyangan Sakéng Bhumi Jawa Kulwan Sargah I*, yang mengisahkan Sang Resi Guru alias *Manikmaya* yang berasal dari India Selatan. Ia menetap di Tarumanagara, dan beristrikan seorang putri raja *Taruma ke-7*. Suryawarman yang berkuasa tahun 535–561 Masehi, diangkat menjadi penguasa wilayah Kendan di bawah Taruma tahun 536–568 Masehi,

bergelar Resi Guru Kendan. Dari pernikahannya Ia berputra beberapa orang, salah seorang di antaranya Rajaputra Suraliman, yang menjadi panglima kesatuan bersenjata *Taruma*. Ia yang menggantikan ayahnya sebagai penguasa wilayah Kendan yang kedua, tahun 568-597 M (bandingkan Darsa, 2019: 3)

Masih dalam teks naskah tersebut, putra Sang Rajaputra, Kandiawan (597-612 M) menggantikan ayahandanya. Dia menggeser pusat kekuasaannya ke arah barat, ke wilayah Medanggana atau Medangjati, sehingga ia dikenal dengan nama Rahiangta di Medangjati/Sang Kandiawan Dewaraja, atau Sang Layuwatang, karena membuat Sanghiang Watang-ageung. Ia dikaruniai lima orang putra yang terkenal dengan julukan *panca-kusika* karena dianggap memiliki sifat-sifat resi dari *kahiyangan*. Setelah Kandiawan wafat, kedudukannya dilanjutkan oleh putra bungsunya bernama Wretikandayun. Nama ini disinggung dalam *Tantu Panggelaran*. Pada masa Wretikandayun (612-702 M) kedudukan pusat kekuasaan dipindahkan ke arah timur, (Galuh), yang awalnya hanyalah sebagai raja wilayah *Taruma*, dan dikenal Rahiangta di Menir, yang setelah berhenti menjabat raja, ia menyusun Purbatisti Purbajati (bandingkan Darsa, 2019: 4).

Data lain tentang *Raja Tarumanagara* terakhir (ke-12) yang bergelar Maharaja Linggawarman hanya berkuasa selama tiga tahun. Dia meninggal dunia pada tahun 669 Masehi. Setelah itu terjadilah pergeseran kekuasaan, yakni *Kerajaan Taruma* turun ke tangan menantunya yang dikenal *Trarusbawa*. Ia menamakan kerajaan yang dikuasainya dengan sebutan *Kerajaan Sunda* yang beribukota di Pakuan Pajajaran (669 M). Namun, tidak diaui oleh wilayah sebelah timur. Beberapa kerajaan wilayah dipersatukan di bawah Wretikandayun dan dinyatakan bahwa wilayah itu berada di bawah kendali Galuh Pakuan yang berdiri sendiri (bandingkan Darsa, 2019: 4).

Catatan kisah perjalanan naskah *Bujangga Manik* (BM), wilayah Kerajaan Sunda masih membentang dari Hujung Kulon (*baris 1359*) hingga batas wilayah Sunda sebelah timur di sungai Cipamali dan Cisarayu, ada hubungannya dengan kropak 406, yang salah satu teksnya berjudul *Fragmen Carita Parahyangan* (FCP). *Trarusbawa* memperbaiki dan memindahkan lokasi keraton “*Sri-Bima Punta Narayana Madura Suradipati*” ke sebuah perbukitan di sekitar Cipakancilan. Sebagai menantu dinasti Warman yang mewarisi tahta Tarumanagara, Ia berupaya menggeser serta membenahi pusat pemerintahannya ke sekitar hulu Cipakancilan, dan berkuasa sebagai Raja Sunda selama 54 tahun (669-723 M).

Andai ditelusuri lebih saksama, ada benang merah antara Kisah Perjalanan Bujangga Manik

dengan kekuasaan Trarusbawa sejak akhir abad VII, yang masih dialami oleh tokoh Bujangga Manik pada sekitar awal abad XVI, daerah Pakancilan merupakan gerbang lokasi keraton “Sri-Bima” yang kemudian lebih dikenal dengan nama Pakuan Pajajaran.

Sumber teks historiografi tradisional CPSBJK 2, mengikhtisarkan nama-nama raja yang memerintah di Galuh Pakuan dan Pakuan Pajajaran, serta nama-nama maharaja yang berhasil mempersatukan kedua pusat pemerintahan Kerajaan Sunda yang saling bersaing sejak tenggelamnya *Tarumanagara*. Semenjak Wretikandayun berkuasa di Galuh hingga tahun 1091 Masehi, telah memerintah 23 orang raja. Sedangkan para raja Sunda dengan Trarusbawa sebagai pendiri Kerajaan Sunda hingga Sri Jayabhupati yang menjadi Maharaja Sunda (1030-1042 M) telah berkuasa 20 orang raja’ (Darsa 2019: 5).

Kerajaan dan Prasasti

Bukti lain yang dianggap sebagai keabsahan sebuah kerajaan adalah prasasti, yang bisa dijadikan sebagai ciri utama adanya perubahan dalam kehidupan budaya orang Sunda dari kebudayaan prasejarah kepada kebudayaan sejarah. Prasasti merupakan tulisan yang ditulis di atas batu atau lembaran logam. Prasasti dianggap juga sebagai legitimasi. Raja-raja yang membuat silsilah biasanya raja-raja yang tidak berhak atas takhta kerajaan. Isi prasasti dapat berupa pujian, sanjungan, keagungan, petunjuk, pedoman atau doa yang menyatakan suatu permohonan (keinginan untuk kedamaian dalam kerajaan; atau inskripsi dalam bahasa yang indah (berirama).

Prasasti berfungsi untuk merekonstruksi sejarah kuno. Bahannya ada yang terbuat dari *tamra* (tembaga), *ripta* (daun tal), dan *upala* (batu). Isinya beragam, ada surat kepada raja, memperingati peresmian bangunan suci/arca, peringatan kemenangan raja dalam menaklukan daerah, ketetapan hukum/keputusan pengadilan, tulisan lain berupa mantra magis dalam upacara. Struktur isi prasasti meliputi: baris awal berupa penanggalan. Ada yang disebut *pancawarna* yakni pasaran, *wugu* yaitu kedudukan terhadap matahari. Cara penulisannya ada yang dari atas ke bawah, berputar dari sisi pertama sampai keempat, ada juga yang berputar dari bawah pada dua sisi (Suryani NS, 2018).

Prasasti berupa perintah raja, nama raja atau pejabat, pejabat yang menerima perintah, isi perintah raja, alasan, keterangan, nama penulis (citraleka/patralekha), dan persembahan. Prasasti peninggalan masa Tarumanagara, yang beraksara Pallawa dan berbahasa Sansekerta, yang sudah ditemukan jumlahnya ada tujuh buah. Ketujuh prasasti tersebut ditemukan di sekitar daerah Bogor (5 buah prasasti), Bekasi (1 buah prasasti), dan Pandeglang (1 buah prasasti) (Suryani NS, 2018).

Bagaimana dengan data dan fakta dari ‘kerajaan baru’ yang kini heboh, seperti Keraton Agung Sejagat, Sunda Empire, Kesultanan Selacau, King of the King, atau kerajaan baru lainnya? Mereka ‘mengklaim’ memiliki bukti dan fakta sejarah berkaitan dengan keberadaan ‘kerajaannya’. Hasil penelusuran pihak terkait, terbukti bahwa semuanya hanya isapan jempol belaka alis ‘bohong’. Sebuah data yang didapat berkaitan dengan ‘papan nama’ yang ada di Kesultanan Selacau, jika kita telaah, baik dari segi aksara maupun bahasa yang digunakan, tidak sesuai dengan pengakuan keberadaannya. Jika dilihat dari aksara yang digunakan, papan nama Kesultanan Selacau memang beraksara Sunda, tapi bukan aksara Sunda Kuno, yang digunakan untuk menulis naskah Sunda kuno abad XVI Masehi maupun prasasti yang ada di daerah Sunda, seperti Prasasti Gegerhanjuang maupun Prasasti Kawali, melainkan aksara Sunda yang sudah dimodifikasi, dengan beberapa kesalahan penulisan *rarangén* ‘vokalisasi’ (tidak menggunakan *panéléng* [é], tapi malah memakai *pamepet* [e], seperti kata *rébu* ditulis *rebu*. Aksara Sunda yang ada pada papan nama tersebut baru disosialisasikan dan diperdakan, nomor 6 tahun 1996, SK Gubernur dan Perda Jabar Nomor 5 tahun 2003, juga Perda Jabar nomor 4 tahun 2014.

Kerajaan dan Karakter Kepemimpinan Dalam Naskah Sunda Kuno

Sebuah kerajaan berkelindan erat dengan kepemimpinan, Pemerintahan, dan kekuasaan. Tidak mungkin ada ‘pemimpin’ sebagai penguasa, apabila tidak memiliki ‘tempat tinggal’ atau keraton. Atau sebaliknya, ada keraton tetapi tidak ada pemimpinnya. Seorang pemimpin atau penguasa yang menempati sebuah kerajaan, dituntut memiliki karakter sebagai negarawan yang dicintai dan menjadi panutan rakyatnya. Harapan masyarakat di seluruh Indonesia, selain pemimpinnya harus *saciduh metu saucap nyata*, juga mampu *ngaraksa, ngariksa, tur ngamumulé* kearifan lokal budaya setempat.

Parigeuing, mengacu kepada kepemimpinan dengan segala kebesaran, kearifan, serta karakter dan sosok seorang pemimpin kharismatik yang mengungkap pesan moral dan petuah berharga, tentang bagaimana mengingatkan/*ngageuing batur* ‘orang lain’ tanpa terasa, untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin dituntut memiliki sifat yang menurut naskah Sanghyang Siksakandang Karesian (SSK), yang dikenal dengan sebutan *Dasa prasanta*. yakni: *Guna* ‘bijaksana’, *Ramah* ‘bijak’, *Hook* ‘kagum’, *Pésok* ‘memikat hati’, *Asih* ‘sayang’, *Karunya* ‘iba’, *Mupreruk* ‘membujuk’, *Ngulas* ‘memuji dan mengoreksi’, *Nyecep* ‘membesarkan hati’, *Ngala angen* ‘mengambil hati’. Seorang pemimpin, harus memiliki *pangimbuhning twah* ‘pelengkap kharisma’, yakni *Emét* ‘tidak konsumtif’.

Imeut ‘teliti, cermat’. *Rajeun* ‘rajin’. *Leukeun* ‘tekun’. *Paka Pradana* ‘beretika’. *Morogol-rogol* ‘beretos kerja tinggi’. *Purusa ning Sa* ‘berjiwa pahlawan’. *Widagda* ‘bijaksana’. *Gapitan* ‘berani berkorban’, *Karawaléya* ‘dermawan’, *Cangcingan* ‘terampil’, serta *Langsitan* ‘cekatan’ (Suryani NS, 2020).

Sebuah kerajaan dituntut memiliki pemimpin ideal yang mampu menjauhi empat karakter negatif/kurang baik, atau *opat paharaman* ‘empat hal yang diharamkan’, yakni *babarian* ‘mudah tersinggung’, *pundungan* ‘mudah merajuk’, *humandeuar* ‘berkeluh kesah’, dan *kukulutus* ‘menggerutu’, serta menjauhi watak manusia yang membuat kerusakan di dunia atau *Catur Buta*, yaitu *Burangkak*, *Mariris*, *Maréndé*, dan *Wirang*.

Seorang Pemimpin menurut naskah *Sanghyang Hayu*, harus menjawai konsep ‘tiga rahasia’, yang mendarah daging dalam dirinya, yaitu *Budi-Guna-Pradana* (bijak-arif-saleh), *Kaya-Wak-Cita* (sehat/kuat-bersabda-hati), *Pratiwi-Akasa-Antara* (bumi-angkasa-antara), *Mata-Tutuk-Talinga* (penglihatan-ucapan-pendengaran), *Bayu-Sabda-Hedap* (energi-ucapan/sabda-itikad/kalbu dan pikiran). Prinsip *astaguna* ‘delapan kearifan’, terdiri atas: *Animan* (lemah lembut), *Ahiman* (tegas), *Mahiman* (berwawasan luas), *Lagiman* (gesit), *Prapti* (tepat sasaran), *Prakamya* (ulet), *Isitwa* (jujur), *Wasitwa* (terbuka untuk dikritik).

Rakyat pada umumnya mendambakan seorang pemimpin yang ideal, dan mampu menjauhi empat larangan, sebagaimana terungkap dalam Naskah Amanat Galunggung (AG), yakni *mulah kwanta* ‘jangan berteriak’, *mulah majar laksana* ‘jangan menyindir’, *mulah madahkeun pada janma* ‘jangan menjelekkkan orang lain’, dan *mulah sabda ngapus* ‘jangan berbohong’. Pemimpin harus mampu menjaga *dasakreta* sebagai perwujudan *dasaindra*, yakni harus menjaga mata, telinga, kulit, lidah, hidung, mulut, tangan, kaki, badan, dan aurat.

Seorang raja dalam suatu kerajaan yang dipimpinnya selayaknya bercermin kepada élmu patanjala ‘*ilmu wujud air*’, sebagaimana dikemukakan dalam naskah AG juga, yakni: *mulah kasimuratan* ‘jangan mudah terpengaruh’, *mulah kasiwurana kanu miburungan tapa* ‘jangan peduli terhadap godaan, dan *mulah kapidéngé kanu carék goréng* ‘jangan dengarkan ucapan yang buruk’. Pemimpin itu harus *siniti* ‘bijak’, *siniyagata* ‘benar’, *siaum* ‘adil dan takwa’, *sihooh* ‘serius’, *sikarungrungan* ‘simpatik’, *semuguyu* ‘ramah’, *téjah ambek* ‘rendah hati’, dan *guru basa* ‘mantap bicara’.

Dalam kerajaan yang dipimpinnya, seorang raja atau pemimpin harus berperilaku sebagai abdi (nagarawan yang baik), sebagaimana diungkapkan dalam naskah naskah AG, yakni: *mulah luhyu* ‘jangan mudah mengeluh’, *mulah kuciwa* ‘jangan kecewa’, *mulah ngontong dipiwarang* ‘jangan sulit diperintah’, *mulah hiri* ‘jangan iri’, dan *mulah dengki* ‘jangan dengki’. Pemimpin harus *cageur* (AQ), *bageur* (EQ),

bener (SO), *pinter* (IQ), *singer* (PQ), *teger* (RQ), *wanter* (ScQ), dan *tajeur* (ExA).

Seorang negarawan atau pemimpin masa kini, di era globalisasi saat ini, sama halnya dengan para raja di masa lalu, diharapkan mampu berperan sebagai *leader* (satu pikiran, perkataan, dan perbuatan), *manajer* (kemampuan *manajerial*), *entertainer* (*human relations*), *entrepreneur* (jiwa kewirausahaan), *commander* (pendorong), *designer* (perancang ideal), *father* (kebapakan), *servicer* (pelayan yang baik), dan *teacher* (guru/menjadi tauladan). Kesembilan kriteria tersebut harus mampu dijawabantahkan dan dicerminkan dalam diri dan sikap seorang pemimpin dan kepemimpinannya, yang akhirnya menuju kepada pemimpin ideal yang mampu bertindak sebagai “master/tokoh”, yang mampu memerdayakan, mencerdaskan, serta menyejahterakan kehidupan orang banyak, yang disegani, dikagumi, dan dicintai rakyatnya “*ngretakeun urang réya*”, dan mampu “*ngretakeun bumi lamba*” ‘menyejahterakan alam dunia’. Pemimpin ideal seperti itulah yang didamba masyarakat Indonesia masa kini dan masa mendatang.

Kerajaan dan Misi Perdamaian Dalam Naskah Sunda Kuno

Peran seorang raja sebagai pemimpin pada masa lampau sangat penting, karena bukan hanya berperan sebagai seorang pemimpin, namun juga memiliki misi perdamaian, agar suasana kehidupan masyarakatnya tatatingtrim kerta raharja, yang direpresentasikan serta diimplementasikan melalui Gong Perdamaian Dunia. Keberadaan Gong Perdamaian Dunia tersebut tidak terlepas dari Karang Kamulyan sebagai salah satu *patilasan* Kerajaan Galuh, dan Kabuyutan Kawali. Hal itu sebagaimana terungkap lewat amanat dan pesan Prabu Niskalawastu Kancana, seperti tersirat lewat Prasasti Kawali dan Prasasti Batu Tulis Bogor, di samping naskah Sunda Kuno, tinggalan budaya berbahan *Lontar*, *nipah*, maupun *Saeh*, beraksara dan berbahasa Sunda kuno.

Peletakan Gong Perdamaian Dunia di kawasan wisata Karang Kamulyan, secara historis maupun folklor yang berkembang di sekitar Karang Kamulyan, juga kaitannya dengan prasasti Kawali. Hal tersebut sejalan dengan visi dan misi awal dari pembuatan ‘Gong Perdamaian Dunia’ itu sendiri. Apabila kita simak cerita lisan *Karang Kamulyan/Carita Ciung Wanara*, kita bisa mencermati bahwa pertikaian antara Ciung Wanara dan Hariyang Banga (keduanya saudara se bapak lain ibu), ternyata dapat didamaikan oleh ‘Sang Prabu’ (ayah kandung mereka sendiri) yang menyamar menjadi seorang ‘kakek’ yang menasehati keduanya.

Pertikaian antara Ciung Wanara dan Hariyang Banga (dalam versi lain disebut Sanjaya) merupakan satu-satunya perkelahian pada masa silam, yang mampu ‘didamaikan’, tidak seperti pertikaian yang lain yang selalu berakhir dengan kehancuran tanpa

perdamaian. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan tujuan didirikannya Gong Perdamaian Dunia di Karang Kamulyan Ciamis.

Amanat Prabu Niskalawastu Kancana dalam Prasasti Kawali 1 hingga 6, Beliau adalah seorang raja yang mumpuni, adil bijaksana, disegani serta dicintai rakyatnya. Beliau telah mampu *ngretakeun urang reya* ‘memerdayakan & menyejahterakan orang banyak’ dan *ngretakeun bumi lamba* ‘menyejahterakan alam dunia’ (menurut *Sanghyang Siksakandang Karesian*), sehingga Beliau termasuk salah satu raja besar Sunda yang digelar Prabu Siliwangi (raja yang harum namanya).

Amanat dan pesan moral yang tersirat dalam prasasti Kawali, bukan hanya memberi makna kesejahteraan, kearifan, kejujuran, dan kerukunan hidup, namun juga kedamaian serta kesatuan berbangsa, bernegara, serta beragama. Tuntunan moral yang Beliau ungkapkan lewat amanat bagi anak cucu dan rakyatnya yang mendiami Kawali serta Galuh (Ciamis sekarang) masih sangat relevan bagi kehidupan masa kini, salah satunya adalah bahwa kita sebagai manusia tidak boleh serakah jika tidak ingin sengsara di kemudian hari “*ulah botoh bisi kokoro*” sebagaimana terungkap lewat Prasasti Kawali 6. Keserakahan tersebut bukan hanya terbatas pada materi semata, tetapi lebih kepada hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Gong Perdamaian Dunia yang ada di Karang Kamulyan, ada kaitannya dengan sejarah perdamaian masa silam di Keraton Galuh Pakwan antara Pembesar Galuh dan Medang Mataram Kuno yang berlangsung pada tahun 740 Masehi. Perdamaian di Galuh Pakwan terlaksana, berkat kewibawaan Sang Resiguru Demunawan, yang mampu menghentikan konflik di Galuh, walaupun saat itu baru saja tiba pasukan Bhairawamamuk dan pasukan Bhatarakroda dari Medang Mataram (bandingkan Darsa, 2017).

Atas inisiatif dan pimpinan Sang Resiguru Demunawan atau Seuweukarma diadakanlah musyawarah di istana Galuh Pakwan, antara para pembesar dari kedua belah pihak. Musyawarah tersebut menghasilkan “sepuluh kesepakatan” yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian, yang ditulis pada tahun 661 Saka bulan Phalguna tanggal 15 paroterang atau 8 Maret 740 Masehi (bandingkan Darsa, 2017).

Kedamaian, kebajikan, kejujuran, kearifan, keutuhan dan persatuan bangsa serta kerukunan beragama, layak untuk diabadikan dalam upaya memelihara keutuhan dan persatuan umat, agar *nonoman Sunda* ‘generasi muda Sunda’ tidak *pareumeun obor* ‘kehilangan jejak’ serta kehilangan jati dirinya.

Isi perdamaian tersebut menurut Darsa (2017), adalah bahwa a) Permusuhan di antara kedua belah pihak diakhiri; mereka saling memaafkan, saling menolong, saling membantu, dan bersahabat; b). Tidak boleh melakukan pembalasan di antara

mereka, karena berasal dari satu nenek moyang; semua anggota kesatuan bersenjata yang tertawan dibebaskan; c) Apabila terjadi pertentangan di antara mereka hendaklah diselesaikan secara damai melalui perundingan; hubungan kekerabatan di antara mereka janganlah putus; janganlah satu negeri menundukan negeri yang lainnya; hendaklah saling mengasihi dan saling menyayangi; d) Raden Kamarasa alias Rahiyang Banga (cucu Sang Sanjaya) diangkat menjadi Raja Sunda dengan gelar Prabhu Kretabhuawana Yasawiguna Hajimulya yang bertahta di Pakwan Pajajaran; wilayah kekuasaannya ialah dari Sungai Citarum ke sebelah barat; e) Raden Sorottoma alias Rahiyang Manarah diangkat menjadi Raja Sunda dengan gelar Prabhu Jayaprakosa Mandhaleswara Sakalabhuawana yang bertahta di Galuh Pakwan; wilayah kekuasaannya ialah dari Sungai Citarum ke sebelah timur (Darsa, 2017);

Perjanjian selanjutnya f) Resiguru Demunawan menjadi Prabhu Resiguru Saunggalah di bumi Galuh Pakwan. Saunggalah menjadi daerah bebas pajak, daerah agama, daerah merdeka; Sang Sanjaya tetap menjadi raja Medang di bumi Mataram. Putra ke-2 Sang Jatmika alias Rahiang Sempakwaja (petinggi kaum *rama* di Kabataran Galunggung); g) Perdagangan dan penangkapan ikan dizinkan secara terbuka; penjagaan pantai laut dilakukan oleh angkatan bersenjata masing-masing dan tapal batasnya dijaga secara bersama; h) Tempat-tempat peribadatan keagamaan dan tempat penyembahan harus dihormati bersama-sama, termasuk semua benda yang diperlukan dalam upacara peribadatan; i) Adat kebiasaan warga masyarakat pribumi setempat harus dilindungi; j) Wilayah tempat tinggal Resiguru Demunawan harus dihormati oleh mereka; janganlah ada yang berkhianat terhadap perjanjian kaum keluarga ini (Darsa, 2017:2).

Surat perjanjian itu dtandatangani oleh 4 orang petinggi kerajaan, yaitu Resiguru Demunawan, Sang Sanjaya, Sang Manarah, dan Sang Banga. Sementara itu, turut menandatangani sebagai saksi ialah 7 orang pembesar kerajaan; yang terdiri atas 4 orang pejabat pemerintahan, masing-masing bernama Sang Panangkaran, Patih Balangantrang, Sang Kretayudha, Panglima Langlangsebrang; dan 3 orang pejabat agama, yaitu *Sang Dharmadyaksa* agama: Siwa, Wisnu, dan Budha. (Darsa, 2017:2).

SIMPULAN

Fenomena munculnya pendirian kerajaan baru di era globalisasi saat ini, tidak didukung dengan fakta dan data yang signifikan. Keberadaan seorang 'raja atau ratu' saat ini tidak didasari adanya genealogi/keturunan, tidak ada keraton tempat seorang raja/

ratu atau pemimpin sebagai penguasa di wilayahnya. Tidak ada pengakuan dan legalitas formal dari pemerintah sebagaimana mestinya. Sebuah kerajaan berkelindan erat dengan karakter seorang raja atau ratu sebagai pemimpin. Figur seorang pemimpin dalam menjalankan hubungan dengan negara lain dapat menentukan berhasil tidaknya pemerintahan yang dijalankannya. Konsep kepemimpinan yang disertai etika berpolitik dari seorang pemimpin, akan menimbulkan kedamaian dan rasa aman bagi rakyatnya.

Pemimpin ideal diharapkan mampu berperan sebagai *leader* (satu pikiran, perkataan, dan perbuatan), *manajer* (kemampuan *manajerial*), *entertainer* (*human relations*), *entrepreneur* (jiwa kewirausahaan), *commander* (pendorong), *designer* (perancang ideal), *father* (kebakapan), *servicer* (pelayan yang baik), dan *teacher* (guru/menjadi tauladan). Kesembilan kriteria tersebut harus mampu diejawantahkan dan dicerminkan dalam diri dan sikap seorang pemimpin dan kepemimpinannya, yang akhirnya menuju kepada pemimpin ideal yang bertindak sebagai "master/tokoh", yang mampu memerdayakan, mencerdaskan, serta menyejahterakan kehidupan orang banyak dan alam dunia, yang disegani, dikagumi, dan dicintai rakyatnya "*ngretakeun urang réya*", dan mampu "*ngretakeun bumi lamba*" 'menyejahterakan alam dunia'. Pemimpin ideal seperti itulah yang didamba masyarakat Indonesia masa kini dan masa mendatang. Pemimpin sebagai *tokoh*, adalah pemimpin yang menjauhi empat karakter yang negatif agar kepemimpinannya berkhairisma, yang dikenal dengan sebutan '*opat paharaman*' atau empat hal yang diharamkan. Pemimpin sebagai 'master' pun, harus menjauhi watak manusia yang membuat kerusakan di dunia yang disebut *Catur Buta*. Kepemimpinan', berkelindan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal, yang harus diejawantahkan oleh seorang pemimpin sebagai *master* dalam kepemimpinannya. Sikap dan perilaku orang Sunda yang tentu saja harus dimiliki oleh seorang pemimpin sebagaimana terungkap dalam naskah Sunda Kuno, meliputi kriteria: *cageur*; *bageur*; *pinter*; *bener*; *singer*; *teger*; *wanter*; dan *tajeur*. sehingga kepemimpinannya berjalan selaras, baik, dan harmonis.

Kedamaian, kebajikan, kejujuran, kearifan, keutuhan dan persatuan bangsa serta kerukunan beragama, yang tersimpan dalam naskah Sunda Kuno, layak untuk digali, diteliti dan dikaji, serta dikembangkan dan diabadikan dalam upaya memelihara keutuhan dan persatuan umat, agar generasi muda Sunda tidak kehilangan jejak serta kehilangan jati dirinya. Sudah sepantasnya kita mengenalkan kembali tinggalan dan sejarah nenek moyang orang Sunda masa lampau, agar *jati diri* orang Sunda tetap lestari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardial. (2010). *Komunikasi Politik*. Jakarta: Indeks.
- Charliyan, Anton & Elis Suryani NS. (2009). *Kepemimpinan Berbasis Kearifan Lokal Budaya Sunda*. Garut: Polwil Priangan.
- Charliyan, Anton. (2015). *Master Leadership*. Jakarta: Solusi Publishing.
- Danasasmita, Saleh, dkk. (1987). *Sewaka Darma, Sanghyang Siksakandang Karesian, Amanat Galunggung. Transkripsi dan Terjemahan*. Bandung: Bagian Proyek Sundanologi
- Darsa, Undang A. (1998). *Sanghyang Hayu. Naskah Jawa Kuno di Sunda*. Bandung: Program Pascasarjana Unpad (Tesis)
- Darsa, Undang A., dkk. (2018). *Lintas Budaya Nusantara dalam Perspektif Kajian Multidisiplin*. Bandung: PT. Raness Media Rancage.
- Darsa, Undang A. & Elis Suryani Nani Sumarlina, Rangga. 2020. *Existence of Sundanese Manuscripts as a Form of Intellectual Tradition in the Ciletuh Geopark Area*. *Jurnal Ilmiah Peuradeun (Sinta 2)* Vol. 8, No. 2, May 2020. ISSN: 2443-2067.
- Harun, Rochajat & Sumarno AP. (2006). *Komunikasi Politik sebagai Suatu Pengantar*. Bandung: Mandar Maju.
- Heriyanto & Elis Suryani Nani Sumarlina. (2019). "Place Branding Through the Linkage Between Metaphore, Sundanese Culture and the Characteristics of the Tourist Destinations: West Java, Indonesia", *Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora*, Volume 1 Nomor 1. 2019.
- Heriyanto, Lestari Manggong, Elis Suryani NS. (2019) "Baduy Cultural Tourism: An Ethnolinguistic Perspective". *International Journal of English Literature and Social Sciences (IJELS)* Vol.-4, Issue-2, March-April. 2019.
- Heriyanto, Lestari Manggong, Elis Suryani NS. (2019) "Language, Identity, and Cultural Tourism: An Ethnolinguistic Case-Study of Kampung Naga. Tasikmalaya, Indonesia. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*. Vol.-3, Issue-3, 2019.
- Nimmo, Dan. (2005). *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*. Terjemahan Tjun Surjaman. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Permana, Rangga SM (2019). *Komunikasi Politik dalam Naskah Sunda*. Bandung: PT. Raness Media Rancage.
- Suryalaga, Hidayat RH. (2009). *Kasundaan Rawayan Jati*. Bandung: Yayasan Nur Hidayat
- Suryani NS, Elis. (2012). *Konsep Pemimpin dan Kepemimpinan yang terungkap Dalam Naskah Buhun*. Yogyakarta: Simposium Internasional Pernaskahan Nusantara.
- Suryani, NS., Elis. (2013a). "Delapan Karakter Pemimpinan Sunda". Bandung: Artikel Pikiran Rakyat, 28 Pebruari 2013.
- Suryani NS, Elis. (2017). *Abdi Negara*. Bandung: Artikel Pikiran Rakyat.
- Suryani NS, Elis. (2018a). *Pemerintahan Yang Tatatingtrim Kertaraharja*. Bandung: Artikel Pikiran Rakyat.
- Suryani NS, Elis. (2018b). *Senarai Kearifan Lokal Budaya I & II*. Bandung: PT. Raness Media Rancage.
- Suryani NS, Elis, dkk. (2018). *Lintas Budaya Nusantara dalam Perspektif Kajian Filologi dan Sejarah*. Bandung: PT. Raness Media Rancage.
- Suryani NS, Elis, & Rangga Saptya Mohamad Permana. (2019a) "Komunikasi Politik dan Budaya Damai Di Zaman Galuh Pakuan, Konstelasinya di Masa Kini", *Jurnal Lokabasa*, Vol. 10, No. 1. tahun 2019.
- Suryani Nani Sumarlina, dkk. (2019b) *Kearifan Lokal Budaya Nusantara dalam Kajian Multidisiplin*. PT. Raness Media Rancage..
- Suryani NS, Elis., Rangga Saptya MP, dan Undang Ahmad Darsa. 2020. *The Role of Sundanese Letters as the One Identity and Language Preserver*. BIPA. EA. DOI.10.4108./eai.9-11-2019-2295037.EUDL.
- Suryani NS, Elis., Heriyanto, dan Ike Rostikawati. 2020. *Introducing Medicinal Herbs Based on Medicinal Old Texts of Baduy Community through the Vocabulary Improvement for Foreigners*. BIPA. EA. DOI.10.4108./eai.9-11-2019 2295037.EUDL.
- Thoha, Miftah. (2009). *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.